



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan dari penjabaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman/acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja dapat dikatakan sebagai bentuk penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Sebagai salah satu dokumen perencanaan, rencana kerja senantiasa terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Dengan menempati posisi lini terdepan, Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD penanggung jawab. Rencana Kerja akan menjadi bahasa implementasi setiap tahun atas Rencana Strategis PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berhasil tidaknya apa yang direncanakan pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitan erat dengan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Dinas melalui Rencana Kerja pada setiap Perangkat Dinas.

Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin”***.

Perencanaan pembangunan khususnya urusan Ketahanan Pangan merupakan perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dari aspek-aspek ketahanan pangan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, berdasar pada Peraturan Bupati No



72 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Perencanaan urusan ketahanan pangan dalam periode 2021 - 2026 bertitik tolak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026, yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan ketahanan pangan selama 5 tahun dalam Renstra Perangkat Daerah Ketahanan Pangan 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 merupakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2022, guna mendukung tercapainya target-target pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi menyusun dokumen Rancangan Akhir Renja untuk mewujudkan tema/fokus pembangunan pada “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Inklusif berbasis Sektor Unggulan Daerah yang Berkelanjutan”.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah - Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Sistematika Peyusunan Rencana Kerja SKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan



- Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 21. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.
 22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
 23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Acara Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 49);
 24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 adalah :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program / kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarnya.



- b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
- e. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi,
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- g. Untuk memudahkan penilaian dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pemerintahan Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.4 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi
- 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan pangan

BAB V. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Srategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi selama tahun 2021 dan



perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sasaran kinerja dinyatakan dalam indikator-indikator sasaran.

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Seperti halnya pengukuran kinerja sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Kinerja kegiatan ditandai dengan capaian indikator kegiatan yang terdiri dari Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit), dan Dampak (Impact)

Pengukuran Realisasi Keuangan

Analisa pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 dilakukan dengan berdasarkan keluaran perhitungan dari pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Keluaran pengukuran ini dievaluasi dengan analisa terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian misi untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Sukabumi pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2021 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2021 belum dapat dikaitkan dengan



pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2021 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.
Anggaran dan Realisasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA ANGGARAN Rp.
Jumlah Total	8.644.570.819,00	6.748.455.791,00	1.896.115.028,00
Belanja Tidak Langsung	4.881.596.181,00	4.851.270.083,00	30.326.098,00
Belanja Langsung	3.762.974.638,00	1.897.185.708,00	1.865.788.930,00
- Belanja Pegawai	74.140.000,00	72.700.000,00	1.440.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	2.770.436.558,00	1.762.256.028,00	1.008.180.530,00
- Belanja Modal	918.398.080,00	62.238.680,00	856.159.400,00

Dari Tabel 1 diatas, dapat dijabarkan secara rinci evaluasi Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Wajib Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja



Tabel 2. Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5
5.2.16.11	<i>Gudang Distribusi Pangan</i>	458.370.000,00	8.370.000,00	1,83
5.2.16.53	<i>Gudang Distribusi Pangan (Luncuran Tahun 2019)</i>	580.000.000,00	64.301.754,00	11,09
5.2.16.54	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) (Luncuran Tahun 2019)</i>	973.350.000,00	121.100.000,00	12,44
TOTAL		1.135.705.000,00	193.771.754,00	17,06

Dari tabel diatas, terdapat 3 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, ini disebabkan keterbatasan pagu anggaran di kas daerah sehingga pembayaran 3 (tiga) kegiatan tersebut diatas dilakukan pada tahun 2021.

Tabel 3. Program / Kegiatan yang memenuhi target kinerja

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5
5	BELANJA	8.644.570.820,00	6.748.464.791,00	78,07
5.1	Belanja Tidak Langsung	4.881.596.182,00	4.851.270.083,00	99,38
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	4.881.596.182,00	4.851.270.083,00	99,38
5.2	Belanja Langsung	3.762.974.638,00	1.897.194.708,00	50,42
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	784.701.658,00	759.988.597,00	96,85
5.2.01.01	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	771.781.158,00	747.578.597,00	96,86
5.2.01.03	<i>Pelayanan Administrasi Aset</i>	3.755.500,00	3.320.000,00	88,40
5.2.01.04	<i>Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	9.165.000,00	9.090.000,00	99,18
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	439.283.080,00	418.617.771,00	95,30
5.2.02.03	<i>Pengadaan Mebeulair</i>	0,00	0,00	0,00



5.2.02.05	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.750.000,00	30.590.600,00	83,24
5.2.02.08	Pengadaan Perangkat Komputer	33.898.080,00	33.898.080,00	100,00
5.2.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	0,00	0,00	0,00
5.2.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	323.510.000,00	309.054.091,00	95,53
5.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	3.275.000,00	3.225.000,00	98,47
5.2.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.2.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.670.000,00	6.670.000,00	100,00
5.2.02.33	Penataan Halaman Kantor	23.380.000,00	23.380.000,00	100,00
5.2.02.38	Penataan dan Pengamanan Arsip	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
5.2.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.297.000,00	3.297.000,00	100,00
5.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	3.297.000,00	3.297.000,00	100,00
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00
5.2.05.21	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.732.500,00	83.860.000,00	98,97
5.2.06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	40.060.000,00	39.930.000,00	99,68
5.2.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	8.925.000,00	8.925.000,00	100,00
5.2.06.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.420.000,00	26.800.000,00	97,74
5.2.06.05	Penyusunan Laporan Keuangan	2.995.000,00	2.885.000,00	96,33
5.2.06.08	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	4.332.500,00	4.320.000,00	99,71
5.2.06.15	Pengembangan dan Pengelolaan Website	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.2.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.450.960.400,00	631.431.340,00	25,76
5.2.16.01	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
5.2.16.02	Pelaksanaannya Bazar/Pasar Murah	0,00	0,00	0,00



	Pangan			
5.2.16.03	Pengembangan Sumber Daya Pangan	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00
5.2.16.04	Pendampingan dan Pengembangan Beras Sukabumiku	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00
5.2.16.06	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Ideal	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00
5.2.16.07	Peningkatan Konsumsi Pangan Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
5.2.16.09	Adhikarya Pangan Nusantara	0,00	0,00	0,00
5.2.16.10	Hari Pangan Sedunia	0,00	0,00	0,00
5.2.16.11	Gudang Distribusi Pangan	458.370.000,00	8.370.000,00	1,83
5.2.16.12	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	8.910.000,00	8.870.000,00	99,55
5.2.16.13	Lomba Cipta Menu (LCM)	0,00	0,00	0,00
5.2.16.14	Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	246.434.000,00	246.363.186,00	99,97
5.2.16.15	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	10.270.000,00	10.270.000,00	100,00
5.2.16.16	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00
5.2.16.17	Analisis FSVA	10.420.000,00	10.420.000,00	100,00
5.2.16.18	Warung Pangan	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00
5.2.16.19	Pembangunan Lumbung Pangan	6.690.000,00	6.690.000,00	100,00
5.2.16.20	Desa Mandiri pangan	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00
5.2.16.21	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.115.000,00	4.115.000,00	100,00
5.2.16.22	Kawasan Mandiri Pangan	5.390.000,00	5.320.000,00	98,70
5.2.16.23	Standarisasi Mutu dan Keamanan Pangan	8.173.000,00	8.173.000,00	100,00
5.2.16.24	Gerakan Keamanan Pangan	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00
5.2.16.25	Bulan Keamanan Pangan Tingkat Kabupaten	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00
5.2.16.26	Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	0,00	0,00	0,00
5.2.16.27	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	60.928.400,00	60.928.400,00	100,00
5.2.16.28	Jambore Keamanan Pangan	0,00	0,00	0,00
5.2.16.30	Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00
5.2.16.31	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	0,00	0,00	0,00



5.2.16.32	<i>Dewan Ketahanan Pangan</i>	800.000,00	800.000,00	100,00
5.2.16.34	<i>Analisis Akses Pangan</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
5.2.16.35	<i>Pemantauan Harga Pangan</i>	17.340.000,00	15.940.000,00	91,93
5.2.16.53	<i>Gudang Distribusi Pangan (Luncuran Tahun 2019)</i>	580.000.000,00	64.301.754,00	11,09
5.2.16.54	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) (Luncuran Tahun 2019)</i>	973.350.000,00	121.100.000,00	12,44
TOTAL		8.644.570.820,00	6.748.464.791,00	78,07

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi nomor 72 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan, pada tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 1 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan 1 Program Pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 Program Utama dengan 14 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :



- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu :
- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah rencana pembangunan dunia untuk lebih baik yang efeknya dapat dirasakan oleh manusia dan bumi. Pada 2030, tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs diharapkan tercapai. Pada tahun 2015, SDGs diserukan dan disetujui oleh semua negara sebagai rencana terbaik dunia untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga lingkungan. Semua negara sadar bahwa pengetasan kemiskinan harus berjalan seiring dengan strategi yang membangun pertumbuhan ekonomi dan mengatasi berbagai kebutuhan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, kesetaraan dan peluang kerja, sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan laut dan hutan kita. SDGs memiliki 17 target dan 169 capaian yang telah ditentukan PBB. Tujuan pembangunan berkelanjutan secara berurutan adalah tanpa kemiskinan (**no poverty**), tanpa kelaparan (**zero hunger**), kehidupan sehat dan sejahtera (**good health and well-being**), pendidikan berkualitas (**quality education**), kesetaraan gender (**gender equality**), air bersih dan sanitasi layak (**clean water and sanitation**), energy



bersih dan terjangkau (**affordable and clean energy**), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (**decent work and economic growth**), industri, inovasi, dan infrastruktur (**industry, innovation and infrastructure**), berkurangnya kesenjangan (**reduced inequalities**), kota dan komunitas berkelanjutan (**sustainable cities and communities**), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (**responsible consumption and production**), penanganan perubahan iklim (**climate action**), ekosistem laut (**life below water**), ekosistem daratan (life on land), perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice and strong institutions), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (partnerships for the goals)

Tanpa kelaparan (zero hunger) adalah salah satu poin SDGs yang menarik karena ketika target-targetnya tercapai, artinya tidak ada seorang pun yang kekurangan gizi, maupun yang mengalami malnutrisi.

Target pertama adalah mengakhiri kelaparan orang-orang di dunia dengan gizi yang cukup, makanan yang aman dan mencukupi sepanjang tahun dengan indikator prevalensi kekurangan gizi dan prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah berdasarkan pada Food Insecurity Experience Scale (FIES). Selanjutnya, target kedua adalah mengakhiri malnutrisi pada tahun 2030, menekan angka penambahan penderita stunting pada usia di bawah lima tahun, dan mengatasi kebutuhan gizi perempuan pada tahun 2025 dengan indikator prevalensi stunting dan dua tipe malnutrisi pada anak di bawah lima tahun. Peran seluruh manusia di dunia dibutuhkan untuk tercapainya kedua target ini

Target Nasional terkait Pengentasan Kelaparan di tingkat global dalam Agenda SDG's telah memasukkan hak atas pangan sebagai tujuan tersendiri, yaitu point 2: "Mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan." Tujuan ini terdiri dari delapan target yang berkisar dari pengentasan kelaparan dan malnutrisi hingga produktivitas pertanian. Sementara itu di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah memasukkan lima dari delapan target global yang akan dicapai pada 2019.



Target nasional yang ditetapkan mencerminkan adanya komitmen tinggi untuk menjamin ketersediaan pangan, termasuk dengan memfasilitasi peralatan pertanian, peternakan dan perikanan, meskipun penting pula untuk memperjelas kelompok sasaran agar dapat menjamin petani skala kecil dan miskin, nelayan, serta petani penggarap (buruh tani) diprioritaskan sebagai penerima fasilitas tersebut. Selain itu, upaya tersebut harus difokuskan pada pembangunan kemampuan petani miskin, petani penggarap dan nelayan untuk mempertahankan hidup mereka, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam memproduksi produk pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendorong konsumsi pangan yang lebih besar. Pada agenda RPJMN, pemerintah berencana membuka akses lebih besar kepada pembiayaan pertanian bagi petani. Namun, tanpa memperhatikan kemampuan petani skala kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengakses bantuan tersebut atau menjaga kinerja kredit yang baik.

Isu strategis yang dapat diangkat menanggapi keadaan yang ada saat ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi adalah antara lain:

1. Ketersediaan Pangan
2. Cadangan Pangan
3. Info Harga, Rantai Pasok, jaringan distribusi dan system logistik daerah
4. Desa Rentan Pangan
5. Konsumsi Pangan Masyarakat
6. Keamanan pangan segar

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik masyarakat, pelaku utama maupun aparat pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan.

Dari isu strategis diatas diselaraskan dengan maka Dinas Ketahanan Pangan memilah permasalahan-permasalahan yang dianggap mendesak untuk segera ditangani diantaranya :

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting bagi upaya meningkatkan ketahanan pangan khususnya tingkat lokal sehingga membutuhkan dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dengan



- mengoptimalkan keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola ketahanan pangan lokal.
- b. Sistem cadangan dan distribusi pangan belum terlaksana dengan baik sehingga diperlukan pengelolaan dengan melibatkan kelompok tani dan gapoktan untuk melakukan pengadaan cadangan pangan dibarengi dengan dukungan modal, juga melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat.
 - c. Penanganan arus distribusi komoditas pangan yang belum dapat ditangani secara optimal termasuk didalamnya kelembagaan pemasaran yang belum optimal.
 - d. Kemitraan dan peran pemerintah, organisasi dan masyarakat masih rendah terhadap penganekaragaman pangan yang menyebabkan diversifikasi pangan masih minim dilakukan melalui kegiatan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan baik di masyarakat, posyandu maupun sekolah-sekolah sehingga pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tentang pentingnya konsumsi pangan dan gizi yang cukup masih rendah
 - e. Belum tersedianya deteksi dini yang dilengkapi indikator-indikator dalam mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi
 - f. Pengawasan terhadap produk pangan olahan baik industri rumah tangga maupun menengah dan besar masih terbatas dilakukan terkait dengan kesadaran produsen dalam masalah mutu dan kebersihan produk.
 - g. Standarisasi yang berkaitan dengan mutu keamanan pangan segar dan olahan diperlukan sosialisai kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya



yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi yang sesuai dengan Amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan program kegiatan Dinas yang di tunjukkan pada Renstra Dinas dan diharapkan tingkat pencapaian kinerja sesuai yang di rencanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD secara lengkap dapat dilihat lampiran Tabel 2.4.



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Sukabumi

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					20,257,229, 218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					39.366.157.118
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.870.906.718	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.870.906.718	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				531.812.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				531.812.500	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bimbingan Teknis Penyusunan Manajemen Risiko	1 kegiatan	377.964.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Bimbingan Teknis Penyusunan Manajemen Risiko	1 kegiatan	377.964.500	
			Digitalisasi Data Pangan (Proyek Prioritas)	1 Aplikasi				Digitalisasi Data Pangan (Proyek Prioritas)	1 Aplikasi		
			Penyusunan Ranwal RKPD TA. 2023	1 dokumen				Penyusunan Ranwal RKPD TA. 2023	1 dokumen		
			Penyusunan Rencana Umum Pengadaan TA 2023	1 dokumen				Penyusunan Rencana Umum Pengadaan TA 2023	1 dokumen		



		Penyusunan Standar Harga TA 2023	1 dokumen			Penyusunan Standar Harga TA 2023	1 dokumen		
		Perubahan Renja TA. 2022	1 dokumen			Perubahan Renja TA. 2022	1 dokumen		
		Renja TA. 2023	1 dokumen			Renja TA. 2023	1 dokumen		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	16.822.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	16.822.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	17.032.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	17.032.000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	16.822.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	16.822.000	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	16.822.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	16.822.000	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja	1 dokumen	55.316.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja	1 dokumen	55.316.000	
		LKPJ	1 dokumen			LKPJ	1 dokumen		
		LPPD	1 dokumen			LPPD	1 dokumen		
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	12 Laporan	31.034.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	12 Laporan	31.034.000	
		Rapat Evaluasi	4 Triwulan			Rapat Evaluasi	4 Triwulan		



5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.051.841.906	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.051.841.906
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik dan elektronik	10 jenis	10.993.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik dan elektronik	10 jenis	10.993.000
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Infocus	1 unit	302.012.666	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Infocus	1 unit	302.012.666
			Laptop (Bagian Perencanaan)	2 Unit				Laptop (Bagian Perencanaan)	2 Unit	
			Layar Infocus	1 buah				Layar Infocus	1 buah	
			Penghancur Kertas	7 buah				Penghancur Kertas	7 buah	
			Personal Computer	7 unit				Personal Computer	7 unit	
			Printer	7 unit				Printer	7 unit	
			Alat Tulis Kantor	40 jenis				Alat Tulis Kantor	40 jenis	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya peralatan rumah tangga	10 jenis	44.775.940	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya peralatan rumah tangga	10 jenis	44.775.940
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	64.223.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	64.223.000
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bahan Cetak	15 jenis	80.662.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bahan Cetak	15 jenis	80.662.300
			Fotocopy	150.000 lembar				Fotocopy	150.000 lembar	



			Penjilidan	1500 eksemplar				Penjilidan	1500 eksemplar			
			Spanduk / Baligho	36 buah				Spanduk / Baligho	36 buah			
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Belanja Jasa Koran / Surat Kabar / Majalah	12 Bulan	45.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Belanja Jasa Koran / Surat Kabar / Majalah	12 Bulan	45.000.000		
			Belanja Jasa Koran / Surat Kabar / Majalah Online/Audio	1 Tahun					Belanja Jasa Koran / Surat Kabar / Majalah Online /Audio		1 Tahun	
			Iklan Ucapan Selamat/Duka di Media Cetak/Online/Audio	12 Bulan					Iklan Ucapan Selamat/Duka di Media Cetak/Online/Audio		12 Bulan	
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitas Tamu Pemda Makan Minum Tamu dalam rangka kunjungan dinas	12 bulan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitas Tamu Pemda Makan Minum Tamu dalam rangka kunjungan dinas	12 bulan	40.000.000		
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	400.925.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	400.925.000		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun					Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	12 laporan	26.750.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	12 laporan	26.750.000		
5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemeliharaan VPS Hosting Cloud	1 paket	36.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemeliharaan VPS Hosting Cloud	1 paket	36.500.000		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.479.856.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.479.856.300		



6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Ess II	1 Unit	571.650.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Ess II	1 Unit	571.650.000
			Kendaraan Dinas Ess IV (R2)	4 Unit				Kendaraan Dinas Ess IV (R2)	4 Unit	
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya kendaraan operasional distribusi pangan	1 unit	520.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya kendaraan operasional distribusi pangan	1 unit	520.000.000
6.3	Pengadaan Mebel		Kursi Pimpinan	13 Buah	124.555.300	Pengadaan Mebel		Kursi Pimpinan	13 Buah	124.555.300
			Kursi Tunggu Rumah	3 Unit				Kursi Tunggu Rumah	3 Unit	
			Meja Direksi	6 Unit				Meja Direksi	6 Unit	
6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		tersedianya peralatan dan mesin perlengkapan kantor	100 %	263.651.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		tersedianya peralatan dan mesin perlengkapan kantor	100 %	263.651.000
6.5	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Digitalisasi Data Pangan	1 aplikasi	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Digitalisasi Data Pangan	1 aplikasi	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				761.169.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				761.169.300
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Bulan	56.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Bulan	56.400.000
			Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 Bulan				Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 Bulan	
			Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan				Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan	
7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Hari Jadi Kabupaten Sukabumi	1 paket	76.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Hari Jadi Kabupaten Sukabumi	1 paket	76.600.000



7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Honor Instruktur Senam Honor Non PNS Honor Penceramah	52 Minggu	628.169.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Honor Instruktur Senam Honor Non PNS Honor Penceramah	52 Minggu	628.169.300	
			Honor Non PNS	13 Bulan				Honor Non PNS	13 Bulan		
			Honor Penceramah	52 Minggu				Honor Penceramah	52 Minggu		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.023.150.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.023.150.000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Bahan Bakar Kendaraan Jabatan	12 Bulan	437.210.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Bahan Bakar Kendaraan Jabatan	12 Bulan	437.210.000	
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R2	11 Unit				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R2	11 Unit		
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R4	5 Unit				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R4	5 Unit		
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bahan Bakar Kendaraan Operasional	12 Bulan	143.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bahan Bakar Kendaraan Operasional	12 Bulan	143.550.000	
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R4	3 Unit				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R4	3 Unit		
8.3	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	5 set	53.280.000	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	5 set	53.280.000	
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan AC	10 unit	28.110.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan AC	10 unit	28.110.000	
			Pemeliharaan CCTV	1 Paket				Pemeliharaan CCTV	1 Paket		
			Pemeliharaan Gordyn	1 Paket				Pemeliharaan Gordyn	1 Paket		
			Pemeliharaan Mesin Absensi	1 Paket				Pemeliharaan Mesin Absensi	1 Paket		



			Pemeliharaan Personal Computer/Laptop	10 unit				Pemeliharaan Personal Computer/Laptop	10 unit			
			Pemeliharaan Printer	10 unit				Pemeliharaan Printer	10 unit			
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	306.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	306.000.000		
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Penataan Halaman Kantor	1 paket	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Penataan Halaman Kantor	1 paket	55.000.000		
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				19.604.541.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				19.604.541.000		
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19.604.541.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19.604.541.000		
1.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat	3 Kegiatan	17.059.047.000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat	3 Kegiatan	17.059.047.000		
			Jumlah lumbung pangan terfasilitasi	5 Unit					Jumlah lumbung pangan terfasilitasi		5 Unit	
			Pembangunan LPMdes dan sarana pendukungnya	12 Paket					Pembangunan LPMdes dan sarana pendukungnya		12 Paket	



			(DAK Fisik Bidang Pertanian)				(DAK Fisik Bidang Pertanian)		
			Pengisian LPM APBD	30 Ton			Pengisian LPM APBD	30 Ton	
			Pengisian LPM APBD 2019	20 Ton			Pengisian LPM APBD 2019	20 Ton	
			Pengisian LPM DAK 2021	40 Ton			Pengisian LPM DAK 2021	40 Ton	
			Pengisian LPM DAK 2022	240 Ton			Pengisian LPM DAK 2022	240 Ton	
			Sosialisasi Lumbung Pangan	1 kegiatan			Sosialisasi Lumbung Pangan	1 kegiatan	
1.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	10 Unit	601.230.000	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	10 Unit	601.230.000
			Sosialisasi Pemanfaatan Lantai Jemur	50 orang			Sosialisasi Pemanfaatan Lantai Jemur	50 orang	
1.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		DED Museum Padi (CPUGG)	1 dokumen	1.247.875.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	DED Museum Padi (CPUGG)	1 dokumen	1.247.875.000
			DED Pembangunan Rumah Produksi Pangan Lokal (CPUGG)	1 dokumen			DED Pembangunan Rumah Produksi Pangan Lokal (CPUGG)	1 dokumen	
			Museum Padi (CPUGG)	1 unit			Museum Padi (CPUGG)	1 unit	
			Pembangunan Rumah Produksi Pangan Lokal (CPUGG)	1 unit			Pembangunan Rumah Produksi Pangan Lokal (CPUGG)	1 unit	
			Penyediaan Alat Pasca Panen	1 unit			Penyediaan Alat Pasca Panen	1 unit	



1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		APN	1 kegiatan	353.625.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		APN	1 kegiatan	353.625.000
			Hari Pangan Sedunia	3 Eveng				Hari Pangan Sedunia	3 Eveng	
			Sosialisasi Sumber Daya Pangan	1 kegiatan				Sosialisasi Sumber Daya Pangan	1 kegiatan	
1.5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Rapat Koordinasi dengan dinas terkait roadmap peta jalan Tersedianya peta jaringan jalan	5 kegiatan 1 kajian 7 dokumen	342.764.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Rapat Koordinasi dengan dinas terkait roadmap peta jalan Tersedianya peta jaringan jalan	5 kegiatan 1 kajian 7 dokumen	342.764.000
III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			5.435.788.150	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			5.435.788.150		
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.312.705.250	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.312.705.250		
1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan	238.685.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan	238.685.000
			Kajian Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen				Kajian Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Desa	386 Desa				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Desa	386 Desa	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan	47 Kecamatan				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan	47 Kecamatan	



			Makanan Tk. Kecamatan				Makanan Tk. Kecamatan		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Propinsi	1 Kegiatan			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Propinsi	1 Kegiatan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Pusat	1 Kegiatan			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Pusat	1 Kegiatan	
			Pemantauan Ketersediaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	10 Pasar			Pemantauan Ketersediaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	10 Pasar	
			Pemantauan Ketersediaan Pangan	1 Kegiatan			Pemantauan Ketersediaan Pangan	1 Kegiatan	
			Pemantauan Serapan Gabah Petani (SERGAP)	1 Kegiatan			Pemantauan Serapan Gabah Petani (SERGAP)	1 Kegiatan	
			Rapat Koordinasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan	4 Triwulan			Rapat Koordinasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan	4 Triwulan	
			Sosialisasi Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan			Sosialisasi Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan	
			Workshop Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan			Workshop Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan	
1.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) percontohan	5 Kelompok	361.455.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) percontohan	5 Kelompok	361.455.000



			Jumlah komoditi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Non beras Non Terigu	5 komoditas			Jumlah komoditi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Non beras Non Terigu	5 komoditas		
			Jumlah laporan produk pangan berdasarkan kearifan lokal daerah	1 dokumen			Jumlah laporan produk pangan berdasarkan kearifan lokal daerah	1 dokumen		
			Jumlah pangan lokal yang dikembangkan	5 Jenis			Jumlah pangan lokal yang dikembangkan	5 Jenis		
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Sinergitas antara Perumda Agri Sukabumi Mandiri dengan LDPM	20 LDPM	264.010.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Sinergitas antara Perumda Agri Sukabumi Mandiri dengan LDPM	20 LDPM	264.010.000	
			Sinergitas antara Perumda Agro Sukabumi Mandiri dengan LUPM	24 LUPM			Sinergitas antara Perumda Agro Sukabumi Mandiri dengan LUPM	24 LUPM		
1.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Aplikasi Pasar Online Sistem Informasi Tampilan Pangan (SITAMPAN (Proyek Prioritas)	1 aplikasi	709.063.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Aplikasi Pasar Online Sistem Informasi Tampilan Pangan (SITAMPAN (Proyek Prioritas)	1 aplikasi	709.063.000	
			Data Informasi Harga Pangan	12 laporan			Data Informasi Harga Pangan	12 laporan		
			Kajian Lembaga Akses Pangan	1 dokumen			Kajian Lembaga Akses Pangan	1 dokumen		
			Pasar Murah	4 Kegiatan			Pasar Murah	4 Kegiatan		
			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10 Pasar			Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10 Pasar		



			Strategis				Strategis		
			Rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional.	1 Kegiatan			Rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional.	1 Kegiatan	
			Rapat Koordinasi Informasi Harga pangan	3 Kegiatan			Rapat Koordinasi Informasi Harga pangan	3 Kegiatan	
			Workshop Informasi Harga Pangan	1 Kegiatan			Workshop Informasi Harga Pangan	1 Kegiatan	
1.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang dimonitoring/dievaluasi/dibina	15 LDPM	351.230.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang dimonitoring/dievaluasi/dibina	15 LDPM	351.230.000
			Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang terbentuk	5 LDPM			Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang terbentuk	5 LDPM	
			Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang terfasilitasi	5 LDPM			Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang terfasilitasi	5 LDPM	
			Kajian Jaringan Distribusi Akses Pangan	1 dokumen			Kajian Jaringan Distribusi Akses Pangan	1 dokumen	
			Kajian Kelembagaan Distribusi Pangan	1 dokumen			Kajian Kelembagaan Distribusi Pangan	1 dokumen	
1.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Fasilitasi Operasional TTIC Kabupaten	1 TTUC	388.262.250	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Fasilitasi Operasional TTIC Kabupaten	1 TTUC	388.262.250
			Jumlah Fasilitasi Operasional LUPM	24 LUPM			Jumlah Fasilitasi Operasional LUPM	24 LUPM	



			Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang dimonitoring/dievaluasi/dibina	19 LUPM			Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang dimonitoring/dievaluasi/dibina	19 LUPM		
			Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang terbentuk	5 LUPM			Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang terbentuk	5 LUPM		
			Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang terfasilitasi	5 LUPM			Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang terfasilitasi	5 LUPM		
			Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbentuk	1 TTI			Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbentuk	1 TTI		
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan				1.440.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan				1.440.000.000
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		imbangan Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Desa	2 Kegiatan	171.000.000		imbangan Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Desa	2 Kegiatan	171.000.000	
			Kaji Terap Implementasi Perbup Cadangan Pangan	1 paket			Kaji Terap Implementasi Perbup Cadangan Pangan	1 paket		
			Monitoring Penyaluran Cadangan Pangan	12 bulan			Monitoring Penyaluran Cadangan Pangan	12 bulan		
			Sosialisasi Cadangan Pangan Desa	120 Desa			Sosialisasi Cadangan Pangan Desa	120 Desa		
2.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		Pemantauan stok gabah di penggilingan dan pedagang	47 kecamatan	155.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		Pemantauan stok gabah di penggilingan dan pedagang	47 kecamatan	155.000.000



2.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Cadangan Pangan yang tersedia	70 ton	910.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Cadangan Pangan yang tersedia	70 ton	910.000.000	
2.4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan	1 unit	204.000.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan	1 unit	204.000.000	
3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi				235.000.000	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi				235.000.000	
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		Draft Perbup Penentuan Harga Minimum Lokal	1 dokumen	235.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		Draft Perbup Penentuan Harga Minimum Lokal	1 dokumen	235.000.000	
			Rapat Koordinasi Lintas Perangkat Daerah untuk penentuan harga minimum lokal	6 Kegiatan				Rapat Koordinasi Lintas Perangkat Daerah untuk penentuan harga minimum lokal	6 Kegiatan		
4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				1.448.082.900	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				1.448.082.900	
4.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Jumlah edukasi dalam pencapaian Target Konsumsi	5 kegiatan	300.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Jumlah edukasi dalam pencapaian Target Konsumsi	5 kegiatan	300.000.000	
			Jumlah laporan ketersediaan dan keragaman produk pangan Lokal	1 dokumen				Jumlah laporan ketersediaan dan keragaman produk pangan Lokal	1 dokumen		
			Jumlah laporan target Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen				Jumlah laporan target Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen		
4.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan		Agrofood Festival Tk.Kab.Sukabumi	1 event	864.365.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan		Agrofood Festival Tk.Kab.Sukabumi	1 event	864.365.000	



Berbasis Sumber Daya Lokal	Bimbingan teknik budidaya tanaman	14 Kegiatan	Berbasis Sumber Daya Lokal	Bimbingan teknik budidaya tanaman	14 Kegiatan
	bimbingan teknis diversifikasi pangan lokal	12 Kegiatan		bimbingan teknis diversifikasi pangan lokal	12 Kegiatan
	bimbingan teknis penyusunan menu B2SA Non Beras Non Terigu	1 Kegiatan		bimbingan teknis penyusunan menu B2SA Non Beras Non Terigu	1 Kegiatan
	Bimtek pemasaran hasil P2L	14 Kegiatan		Bimtek pemasaran hasil P2L	14 Kegiatan
	Bimtek pengemasan hasil P2L	14 Kegiatan		Bimtek pengemasan hasil P2L	14 Kegiatan
	Buku menu B2SA	50 Buku		Buku menu B2SA	50 Buku
	Diseminasi P2KP tingkat rumah tangga	10 Lokasi		Diseminasi P2KP tingkat rumah tangga	10 Lokasi
	Fasilitas sarana dan prasarana Pemasaran (intergrasi dekranasda)	1 paket		Fasilitas sarana dan prasarana Pemasaran (intergrasi dekranasda)	1 paket
	Gerakan konsumsi pangan non beras non terigu	5 Lokasi		Gerakan konsumsi pangan non beras non terigu	5 Lokasi
	Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten	1 event		Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten	1 event
	Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi	1 event		Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi	1 event
	Lomba Mewarnai Gambar Sayur & Buah	1 event		Lomba Mewarnai Gambar Sayur & Buah	1 event



			P2KP pada usia sekolah	10 Kegiatan			P2KP pada usia sekolah	10 Kegiatan		
			Pelatihan Olah Pangan Lokal (Integrasi Dekranasda)	50 peserta			Pelatihan Olah Pangan Lokal (Integrasi Dekranasda)	50 peserta		
			Peningkatan Kecakapan Hidup/Life Skill (Proyek Prioritas)	50 peserta			Peningkatan Kecakapan Hidup/Life Skill (Proyek Prioritas)	50 peserta		
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Kegiatan			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Kegiatan		
			Promosi P2KP melalui media elektronik & media visual	12 Bulan			Promosi P2KP melalui media elektronik & media visual	12 Bulan		
			Promosi pangan lokal melalui event regional & nasional	6 Event			Promosi pangan lokal melalui event regional & nasional	6 Event		
			rapat koordinasi kegiatan upaya percepatan penganekaragaman melalui pekarangan pangan lestari	2 Kegiatan			rapat koordinasi kegiatan upaya percepatan penganekaragaman melalui pekarangan pangan lestari	2 Kegiatan		
			Sosialisasi kegiatan P2L bagi pendamping/petugas	1 Kegiatan			Sosialisasi kegiatan P2L bagi pendamping/petugas	1 Kegiatan		
			Technical Meeting LCM Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan			Technical Meeting LCM Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan		
4.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan		Gerakan konsumsi pangan non	5 lokasi	283.717.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	Gerakan konsumsi pangan non	5 lokasi	283.717.900	



	Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		beras non terigu			Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		beras non terigu			
			Jumlah laporan hasil penghitungan skor kabupaten	1 dokumen				Jumlah laporan hasil penghitungan skor kabupaten	1 dokumen		
			Jumlah laporan target Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen				Jumlah laporan target Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen		
			Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung program P2WKSS, PKK dan program lintas sektor lainnya	10 Paket				Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung program P2WKSS, PKK dan program lintas sektor lainnya	10 Paket		
			Rapat Koordinasi Lintas Perangkat Daerah	3 kegiatan				Rapat Koordinasi Lintas Perangkat Daerah	3 kegiatan		
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				845.311.250	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				845.311.250	
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				296.311.250	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				296.311.250	
1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		FGD Tim Penyusunan FSVA	1 kegiatan	296.311.250	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		FGD Tim Penyusunan FSVA	1 kegiatan	296.311.250	
			FGD Tim Penyusunan SKPG	1 kegiatan					FGD Tim Penyusunan SKPG		1 kegiatan
			Jumlah Peserta Diseminasi Hasil Penyusunan FSVA	50 orang					Jumlah Peserta Diseminasi Hasil Penyusunan FSVA		50 orang
			Jumlah Peserta Diseminasi Hasil Penyusunan	50 orang					Jumlah Peserta Diseminasi Hasil Penyusunan		50 orang



			SKPG				SKPG				
			Kajian Penyusunan analisis FSVA dengan pihak ketiga (Jasa Konsultan)	1 dokumen			Kajian Penyusunan analisis FSVA dengan pihak ketiga (Jasa Konsultan)	1 dokumen			
			Kajian Penyusunan analisis SKPG dengan pihak ketiga (Jasa Konsultan)	1 dokumen			Kajian Penyusunan analisis SKPG dengan pihak ketiga (Jasa Konsultan)	1 dokumen			
			Monitoring dan Evaluasi FSVA	386 Desa			Monitoring dan Evaluasi FSVA	386 Desa			
			Monitoring dan Evaluasi SKPG	47 Kecamatan			Monitoring dan Evaluasi SKPG	47 Kecamatan			
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			549.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				549.000.000		
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta diseminisasi	55 orang	299.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta diseminisasi	55 orang	299.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kabupaten	1 Kegiatan					Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kabupaten		1 Kegiatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kabupaten	386 Desa					Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kabupaten		386 Desa
			Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kecamatan	47 Kecamatan					Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kecamatan		47 Kecamatan



			Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Propinsi	1 Kegiatan				Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Propinsi	1 Kegiatan		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Pusat	1 Kegiatan				Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Pusat	1 Kegiatan		
			Monitoring dan Evaluasi Penanganan Derah Rawan Pangan	386 Desa				Monitoring dan Evaluasi Penanganan Derah Rawan Pangan	386 Desa		
2.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis Pembinaan Desa Mandiri Pangan	50 orang	250.000.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis Pembinaan Desa Mandiri Pangan	50 orang	250.000.000	
		Bimbingan Teknis Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan	50 orang				Bimbingan Teknis Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan	50 orang			
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Warung Pangan	1 kegiatan				Bimbingan Teknis Pengelolaan Warung Pangan	1 kegiatan			
		Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat /kelompok tani	5 paket				Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat /kelompok tani	5 paket			
		umlah warung pangan	2 lokasi				umlah warung pangan	2 lokasi			
V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.609.610.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.229.610.000			
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			2.609.610.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			2.229.610.000			



1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Direktori OKKPD Tingkat Kabupaten Sukabumi	10 buku	380.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Direktori OKKPD Tingkat Kabupaten Sukabumi	10 buku	380.000.000
			Draft perundang-undangan penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu PSAT	1 Dokumen'				Draft perundang-undangan penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu PSAT	1 Dokumen'	
			Jumlah peserta bimtek keamanan dan mutu pangan di lokasi CPUGG	3 kegiatan				Jumlah peserta bimtek keamanan dan mutu pangan di lokasi CPUGG	3 kegiatan	
			Jumlah peserta bimtek petugas surveillance PSAT	1 kegiatan				Jumlah peserta bimtek petugas surveillance PSAT	1 kegiatan	
			Jumlah Peserta Diseminasi Pengawasan Keamanan & Mutu Pangan pada Ritel & Rumah Kemas	50 peserta				Jumlah Peserta Diseminasi Pengawasan Keamanan & Mutu Pangan pada Ritel & Rumah Kemas	50 peserta	
			Jumlah peserta rapat koordinasi pengendalian PSAT	2 kegiatan				Jumlah peserta rapat koordinasi pengendalian PSAT	2 kegiatan	
			Kader Pangan Aman	47 Kecamatan				Kader Pangan Aman	47 Kecamatan	
			Kampanye Keamanan Pangan	47 Kecamatan				Kampanye Keamanan Pangan	47 Kecamatan	



			Leaflet Keamanan & Mutu Pangan	5 jenis				Leaflet Keamanan & Mutu Pangan	5 jenis		
			Media Informasi Keamanan dan Mutu PSAT	1 paket				Media Informasi Keamanan dan Mutu PSAT	1 paket		
			Pelatihan Pengambil Contoh Keamanan & Mutu PSAT	5 orang				Pelatihan Pengambil Contoh Keamanan & Mutu PSAT	5 orang		
			Pembinaan dan Pengawasan Keamanan & Mutu Pangan	24 kali				Pembinaan dan Pengawasan Keamanan & Mutu Pangan	24 kali		
			World Safety Day Tingkat Kabupaten	1 event				World Safety Day Tingkat Kabupaten	1 event		
1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah		Pencetakan Hologram Produk Prima	125 lembar	340.000.000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah		Pencetakan Hologram Produk Prima	125 lembar	340.000.000	
			Sertifikat keamanan PSAT	25 produk				Sertifikat keamanan PSAT	25 produk		
			Sertifikat Prima	25 produk				Sertifikat Prima	25 produk		
1.3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Sampel pengajuan pengujian PSAT-PDUK	25 produk	351.000.000	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		ampel pengajuan pengujian PSAT-PDUK Identifikasi lokasi pengajuan Pendaftaran Produk Prima Identifikasi lokasi pengajuan Pendaftaran PSAT-PDUK Identifikasi produk	25 produk 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 125 lembar 25 produk 25 produk 50 kali 50 kali	351.000.000	



			sampel pengajuan pengujian Produk Prima	25 produk								
			Sertifikat Prima	25 produk								
			Surveillance registrasi Produk Prima	50 Kali								
			Surveillance registrasi PSAT-PDUK	50 Kali								
1.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah inspeksi pangan segar asal tumbuhan	1 komoditas	570.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah inspeksi pangan segar asal tumbuhan	1 komoditas	570.000.000		
			Rekomendasi sertifikasi Produk Prima	25 produk					Rekomendasi sertifikasi Produk Prima		25 produk	
			Rekomendasi sertifikasi PSAT	25 petani					Rekomendasi sertifikasi PSAT		25 petani	
1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Alat Pendukung pengujian keamanan dan mutu pangan	20 jenis	968.610.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Alat Pendukung pengujian keamanan dan mutu pangan	20 jenis	968.610.000		
			Aplikasi SiKASEP (Sistem Informasi Keamanan dan Kesehatan Pangan)	1 aplikasi					Aplikasi SiKASEP (Sistem Informasi Keamanan dan Kesehatan Pangan)		1 aplikasi	
			Bahan Uji Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan	3 paket					Bahan Uji Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan		3 paket	
			Jumlah inspeksi pangan segar asal tumbuhan	1 komoditas					Jumlah inspeksi pangan segar asal tumbuhan		1 komoditas	



2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan melalui tahapan proses yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD. Proses tersebut dimulai dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selanjutnya hasil dari Musrenbangdes tersebut yang dibawa sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten guna mensinkronisasikan usulan program/kegiatan yang telah disusun di tingkat propinsi.

Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan isu-isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga ke depan diharapkan isu-isu tersebut dapat tertangani dengan baik.

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Sukabumi harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikordinir oleh BAPPEDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat propinsi dan Pusat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

3.1.1. *Visi Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan*

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara sinergis. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 – 2020, yaitu: *“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”*.

3.1.2. *Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan*

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015 – 2020, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya local
5. Mewujudkan keamanan pangan segar

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan pasal 11 dan pasal 14 Undang-



Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Tema pembangunan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berpenghasilan Menengah-Tinggi

- Transformasi struktural berjalan
- Produktivitas tenaga kerja meningkat iklim investasi kondusif
- GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055

Sejahtera

- Kualitas hidup meningkat
- Perilaku disiplin dan beradab
- SDM berkualitas dan berdaya saing
- Indeks kebahagiaan meningkat

Adil

- Ketimpangan menurun
- Redistribusi berjalan baik

Berkesinambungan

- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*)
- Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal pada 2022, maka kata kunci dalam RKP pada 2022 diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan



pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4–6,0 persen secara *year on year*. Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi *Covid-19*, 2022 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak *Covid-19*, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi. Hal ini merupakan kelanjutan dari tema pembangunan nasional pada tahun sebelumnya, yakni “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**” tema ini dipilih dengan pertimbangan mitigasi *covid-19*. Pandemi *covid-19* telah menimbulkan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 dan berpengaruh di 2021.

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2022 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 Major Project yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara. Adapun RKAP Tahun 2021 memuat 7 agenda prioritas untuk pembangunan jangka menengah nasional. Ketujuh agenda ini sekaligus menjawab dampak yang diakibatkan dari pandemi *covid-19* terhadap melesetnya target rencana pemerintah jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Berikut ketujuh agenda tersebut :

1. Penguatan ketahanan ekonomi;
2. Pengembangan wilayah;
3. Peningkatan SDM;
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Penguatan infrastruktur;
6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.



Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat, melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dilakukan dengan :

- a. Memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan motivasi masyarakat
- c. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan
- d. Meningkatkan kemandirian ketahanan pangan

Ketahanan Pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu sebagai persyaratan bagi keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang harus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus



berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antara seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan yang meliputi pengkajian, perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan, diimplementasikan dalam beberapa bentuk program aksi yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- a. Ketersediaan pangan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutu yang aman.
- b. Distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat dijangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga.
- c. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensi.

Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut diatas maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi terdiri dari 3 (Tiga) jenis pelayanan dasar :

1. Bidang Ketersediaan
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3. Bidang Distribusi Pangan



Dari 3 (tiga) jenis layanan dasar tersebut dengan 5 (lima) indikator sebagai berikut :

1. Prosentase Penurunan Daerah Rentan Pangan
2. Peningkatan Cadangan Pangan
3. Peningkatan Ketersediaan Energi
4. Prosentase Peningkatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
5. Prosentase Distribusi Pangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016–2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah **”TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATHIN”**

Sejalan dengan VISI di atas, terdapat 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang akan ditempuh, yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.



Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan dalam menunjang untuk mewujudkan visi tersebut yaitu terdapat pada misi ke-2 (satu) yaitu **“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan”**.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, yang menjadi salah satu isu adalah tentang ketahanan pangan selain daya beli. Ini yang menjadi isu krusial di Indonesia, tentang bagaimana jalur distribusi dan pasokan pangan berjalan lancar. Juga tidak kalah penting soal daya beli selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di Kab Sukabumi. Sehingga turut berkontribusi pada menurunnya pendapatan perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menjadikan pangan sebagai prioritas untuk solusi pemulihan ekonomi untuk sekarang ini sangatlah tepat karena pengaruh pangan ini multidimensi. Bila kebutuhan pangan terpenuhi, maka semua sektor akan kembali pulih. Berdasarkan isu strategis ketahanan, pangan pola konsumsi masyarakat Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi masih kurang beragam, terutama untuk pemenuhan karbohidrat. Dengan mengubah bahwa kenyang itu tidak harus nasi tapi bisa juga dengan ketela, ubi, dan yang lainnya sebagai pengganti beras.

Sektor pertanian dan ketahanan pangan dinilai dapat menjadi salah satu penentu percepatan recovery ekonomi, atau pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Sukabumi. Program pemulihan



ekonomi dan program stimulus yang digulirkan pemerintah dengan salah satu sasarnya sektor pertanian dan ketahanan pangan sudah sangat tepat.

Adapun implementasinya dilakukan melalui kegiatan pelatihan, yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk para pelaku usaha baru ataupun untuk IKM / UKM yang telah berjalan. Program pemulihan ekonomi ini dapat menjadi stimulus terhadap sektor yang terdampak pandemic sehingga diharapkan mampu berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru bagi para korban PHK akibat terdampak pandemi.

Kementerian keuangan menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan 2021 meningkat sangat signifikan sebesar 30% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terjadi penurunan. Anggaran ini akan digunakan untuk program ketahanan pangan 2021 agar dapat meningkatkan produksi pangan, sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi.

Jika dilihat anggaran ketahanan pangan dari 2016 sampai dengan 2020 trennya turun dan di tahun 2021 meningkat. Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp62,8 triliun dengan rincian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun, alokasi APBN 2021 diberikan kepada subsidi sebesar Rp25,3 triliun dan belanja lain-lain Rp5,4 triliun. Sementara, Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp5,6 triliun berupa DAK irigasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, dan DAK non fisik dana pelayanan ketahanan pangan.

Peningkatan anggaran 2021 cukup besar sehingga diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2021 akan berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan melalui membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Selain itu, Pemerintah juga akan merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan. Sektor



pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional. Tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate di sektor ini juga sangat besar sehingga Sektor pertanian dapat menjadi kunci penciptaan tenaga kerja. Dalam melaksanakan rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 disusun berdasarkan pada RENSTRA 2016 – 2021 yang sudah dilakukan pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 untuk memenuhi target IKU tahun 2022, antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD



3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel



7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - h. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - i. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - j. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - k. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
 - l. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan



III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - d. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - f. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - a. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
 - a. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
 - b. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi



- a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota



e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penjabaran / uraian keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 adalah sebagaimana digambarkan dalam matrik tabel 3.2.



**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi**

Kode	Rencana Tahun 2022							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	09								6.505.135.000			
2	09	01			100%	10.870.906.718	APBD		6.503.765			
2	09	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1%	531.812.500	APBD	1%	255.000.000		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Bimbingan Teknis Penyusunan Manajemen Risiko	1 kegiatan	377.964.500	APBD	1 kegiatan	75.000.000
				Digitalisasi Data Pangan (Proyek Prioritas)			1 Aplikasi	1 Aplikasi				
				Penyusunan Ranwal RKPd TA. 2023			1 dokumen	1 dokumen				



						Penyusunan Rencana Umum Pengadaan TA 2023	1 dokumen				1 dokumen	
						Penyusunan Standar Harga TA 2023	1 dokumen				1 dokumen	
						Perubahan Renja TA. 2022	1 dokumen				1 dokumen	
						Renja TA. 2023	1 dokumen				1 dokumen	
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	16.822.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	17.032.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	16.822.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	16.822.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja	1 dokumen	55.316.000	APBD		1 dokumen	30.000.000
					LKPJ	1 dokumen					1 dokumen	
					LPPD	1 dokumen					1 dokumen	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	12 Laporan	31.034.000	APBD		12 Laporan	50.000.000



							Rapat Evaluasi	4 Triwulan				4 Triwulan	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			49,00%	5.630.473.712	APBD		49,00%	6.500.075.000
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketahanan Pangan	Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.531.934.712	APBD		14 Bulan	6.500.000.000
							Tambahan Penghasilan ASN	14 Bulan				14 Bulan	
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	1 dokumen	20.875.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
2	09	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Ketahanan Pangan	Tanggapan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP)	1 dokumen	36.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
							Tanggapan Hasil Reviu (LHR)	4 Triwulan				4 Triwulan	
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Bimbingan Teknis Penatausahakeuangan	1 Kegiatan	25.164.000	APBD		1 Kegiatan	20.000.000
							Laporan Keuangan Bulanan	12 Laporan				12 Laporan	
							Laporan Keuangan Triwulanan	4 Laporan				4 Laporan	
							Laporan Keuangan Semesteran	2 Lapporan				2 Lapporan	



2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2022	1 laporan	16.500.000	APBD		1 laporan	
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6%	36.500.000	APBD		6%	20.000.000
2	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	36.500.000	APBD		12 Laporan	20.000.000
				Penyusunan RKBMD TA 2021			1 Kegiatan				1 Kegiatan		
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1%	356.103.000	APBD		1%	390.000.000
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Ketahanan Pangan	Pakaian Batik Tradisional	55 Stel	139.644.000	APBD		55 Stel	150.000.000
				Pakaian Dinas Harian (PDH)			55 Stel				55 Stel		
				Pakaian Tradisional			55 Stel				55 Stel		
				Pakaian Olahraga			55 Stel				55 Stel		
				Sepatu Olahraga			55 Stel				55 Stel		
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Data Pegawai yang naik gaji berkala	1 dokumen	22.500.000	APBD		1 dokumen	-
						Data Pegawai yang naik pangkat	1 dokumen				1 dokumen		



							Data Pegawai yang pensiun	1 dokumen				1 dokumen	
2	09	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Cetak ID Card	55 orang	23.935.000	APBD		55 orang	15.000.000
						Pemeliharaan Database kepegawaian	35 dokumen				35 dokumen		
						Pemutakhiran database kepegawaian	35 dokumen				35 dokumen		
2	09	01	2.02	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Peserta yang mengikuti diklat teknis	10 orang	85.250.000	APBD		10 orang	160.000.000
2	09	01	2.02	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	1 kegiatan	34.460.000	APBD		1 kegiatan	30.000.000
2	09	01	2.02	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Motivasi Pegawai	1 kegiatan	50.314.000			1 kegiatan	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3%	1.051.841.906	APBD		3%	1.365.000.000
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	Tersedianya alat listrik dan elektronik	10 jenis	10.993.000	APBD		10 jenis	10.000.000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Infocus	1 unit	302.012.666	APBD		1 unit	350.000.000



					Kantor	Laptop (Bagian Perencanaan)	2 Unit				2 Unit	
						Layar Infocus	1 buah				1 buah	
						Penghancur Kertas	7 buah				7 buah	
						Personal Computer	7 unit				7 unit	
						Printer	7 unit				7 unit	
						Alat Tulis Kantor	40 jenis				40 jenis	
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	10 jenis	44.775.940	APBD		10 jenis	30.000.000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 tahun	64.223.000	APBD		1 tahun	25.000.000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak	15 jenis	80.662.300	APBD		15 jenis	550.000.000
						Fotocopy	150.000 lembar				150.000 lembar	
						Penjilidan	1500 eksemplar				1500 eksemplar	
						Spanduk / Baligho	36 buah				36 buah	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Jasa Koran / Surat Kabar / Majalah	12 Bulan	45.000.000	APBD		12 Bulan	150.000.000
						Belanja Jasa Koran / Surat Kabar / Majalah Online/Audio	1 Tahun				1 Tahun	



							Iklan Ucapan Selamat/Duka di Media Cetak/Online/Audio	12 Bulan				12 Bulan	
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitas Tamu Pemda Makan Minum Tamu dalam rangka kunjungan dinas	12 bulan	40.000.000	APBD		12 bulan	3.000.000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	400.925.000	APBD		1 Tahun	700.000.000
						Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun				1 Tahun		
2	09	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	12 laporan	26.750.000	APBD		12 laporan	15.000.000
2	09	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemeliharaan VPS Hosting Cloud	1 paket	36.500.000	APBD		1 paket	-
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6%	1.479.856.300	APBD		6%	-
2	09	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketahanan Pangan	Kendaraan Dinas Ess II	1 Unit	571.650.000	APBD		1 Unit	
							Kendaraan Dinas Ess IV (R2)	4 Unit				4 Unit	
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			tersedianya kendaraan operasional distribusi pangan	1 unit	520.000.000	APBD		1 unit



2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Kursi Pimpinan	13 Buah	124.555.300	APBD		13 Buah	-
							Kursi Tunggu Rumah	3 Unit				3 Unit	
							Meja Direksi	6 Unit				6 Unit	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		tersedianya peralatan dan mesin perlengkapan kantor	100 %	263.651.000	APBD		100 %	-
2	09	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Digitalisasi Data Pangan	1 aplikasi	0	APBD		1 aplikasi	-
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3%		761.169.300	APBD		3%	785.000.000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan Jasa Komunikasi	12 Bulan	56.400.000	APBD		12 Bulan	60.000.000
							Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 Bulan				12 Bulan	
							Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	12 Bulan				12 Bulan	
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Hari Jadi Kabupaten Sukabumi	1 paket	76.600.000	APBD		1 paket	125.000.000
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Honor Instruktur	52 Minggu	628.169.300	APBD		52 Minggu	600.000.000
							Honor Non PNS	13 Bulan				13 Bulan	



							Honor Penceramah	52 Minggu				52 Minggu	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32%	1.023.150.000	APBD		32%	875.000.000
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketahanan Pangan	Bahan Bakar Kendaraan Jabatan	12 Bulan	437.210.000	APBD		12 Bulan	450.000.000
							Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R2	11 Unit				11 Unit	
							Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R4	5 Unit				5 Unit	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Ketahanan Pangan	Bahan Bakar Kendaraan Operasional	12 Bulan	143.550.000	APBD		12 Bulan	-
							Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jabatan R4	3 Unit				3 Unit	
2	09	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	5 set	53.280.000			5 set	-
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Pemeliharaan AC	10 unit	28.110.000	APBD		10 unit	25.000.000
							Pemeliharaan CCTV	1 Paket				1 Paket	
							Pemeliharaan Gordyn	1 Paket				1 Paket	



							Pemeliharaan Mesin Absensi	1 Paket				1 Paket	
							Pemeliharaan Personal Computer/Laptop	10 unit				10 unit	
							Pemeliharaan Printer	10 unit				10 unit	
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	306.000.000	APBD		1 paket	200.000.000
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Penataan Halaman Kantor	1 paket	55.000.000	APBD		1 paket	200.000.000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	19.604.541.000	APBD dan DAK		Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	300.000.000
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			49%	19.604.541.000	APBD & DAK		49%	-
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat	3 Kegiatan	17.059.047.000	APBD		3 Kegiatan	
							Jumlah lumbung pangan terfasilitasi	5 Unit		APBD		5 Unit	



							Pembangunan LPMdes dan sarana pendukungnya (DAK Fisik Bidang Pertanian)	12 Paket		DAK		12 Paket	
							Pengisian LPM APBD	30 Ton		APBD		30 Ton	
							Pengisian LPM APBD 2019	20 Ton		APBD		20 Ton	
							Pengisian LPM DAK 2021	40 Ton		APBD		40 Ton	
							Pengisian LPM DAK 2022	240 Ton		APBD		240 Ton	
							Sosialisasi Lumbung Pangan	1 kegiatan		APBD		1 kegiatan	
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	10 Unit	601.230.000	APBD		10 Unit	300.000.000
						Sosialisasi Pemanfaatan Lantai Jemur	50 orang					50 orang	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	DED Museum Padi (CPUGG)	1 dokumen	1.247.875.000	APBD		1 dokumen	
						DED Pembangunan Rumah Produksi Pangan Lokal (CPUGG)	1 dokumen					1 dokumen	



							Museum Padi (CPUGG)	1 unit				1 unit	
							Pembangunan Rumah Produksi Pangan Lokal (CPUGG)	1 unit				1 unit	
							Penyediaan Alat Pasca Panen	1 unit				1 unit	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	APN	1 kegiatan	353.625.000	APBD		1 kegiatan	
						Hari Pangan Sedunia	3 Eveng				3 Eveng		
						Sosialisasi Sumber Daya Pangan	1 kegiatan				1 kegiatan		
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Rapat Koordinasi dengan dinas terkait roadmap peta jalan Tersedianya peta jaringan jalan	5 kegiatan 1 kajian 7 dokumen	342.764.000	APBD		5 kegiatan 1 kajian 7 dokumen	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Persentase Tingkat Konsumsi Beras	5.435.788.150	APBD		Persentase Tingkat Konsumsi Beras	1.070.000.000
							Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola				Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola		



2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		42,54%	2.312.705.250	APBD		42,54%	1.070.000.000
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan	238.685.000	APBD	1 Kegiatan	-
							Kajian Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen			1 Dokumen	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Desa	386 Desa			386 Desa	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Kecamatan	47 Kecamatan			47 Kecamatan	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Propinsi	1 Kegiatan			1 Kegiatan	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tk. Pusat	1 Kegiatan			1 Kegiatan	
							Pemantauan Ketersediaan Hari Besar Keagamaan	10 Pasar			10 Pasar	



							Nasional (HBKN)						
							Pemantauan Ketersediaan Pangan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
							Pemantauan Serapan Gabah Petani (SERGAP)	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
							Rapat Koordinasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan	4 Triwulan				4 Triwulan	
							Sosialisasi Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
							Workshop Neraca Bahan Makanan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Jumlah kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) percontohan	5 Kelompok	361.455.000	APBD		5 Kelompok	-
						Jumlah komoditi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Non beras Non Terigu	5 komoditas				5 komoditas		
						Jumlah laporan produk pangan berdasarkan kearifan lokal daerah	1 dokumen				1 dokumen		
						Jumlah pangan lokal yang dikembangkan	5 Jenis				5 Jenis		



2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Sinergitas antara Perumda Agri Sukabumi Mandiri dengan LDPM	20 LDPM	264.010.000	APBD		20 LDPM	
							Sinergitas antara Perumda Agro Sukabumi Mandiri dengan LUPM	24 LUPM				24 LUPM	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Aplikasi Pasar Online Sistem Informasi Tampilan Pangan (SITAMPAN (Proyek Prioritas)	1 aplikasi	709.063.000	APBD		1 aplikasi	
							Data Informasi Harga Pangan	12 laporan				12 laporan	
							Kajian Lembaga Akses Pangan	1 dokumen				1 dokumen	
							Pasar Murah	4 Kegiatan				4 Kegiatan	
							Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Strategis	10 Pasar				10 Pasar	
							Rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional.	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
							Rapat Koordinasi Informasi Harga pangan	3 Kegiatan				3 Kegiatan	
							Workshop Informasi Harga Pangan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	



2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang dimonitoring/dievaluasi/dibina	15 LDPM	351.230.000	APBD		15 LDPM	1.070.000.000
							Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang terbentuk	5 LDPM				5 LDPM	
							Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang terfasilitasi	5 LDPM				5 LDPM	
							Kajian Jaringan Distribusi Akses Pangan	1 dokumen				1 dokumen	
							Kajian Kelembagaan Distribusi Pangan	1 dokumen				1 dokumen	
2	09	03	2.01	07	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Fasilitasi Operasional TTIC Kabupaten	1 TTUC	388.262.250	APBD		1 TTUC	-
							Jumlah Fasilitasi Operasional LUPM	24 LUPM				24 LUPM	
							Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang dimonitoring/dievaluasi/dibina	19 LUPM				19 LUPM	
							Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang terbentuk	5 LUPM				5 LUPM	
							Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang terfasilitasi	5 LUPM				5 LUPM	



							Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbentuk	1 TTI				1 TTI	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan			26,49%	1.440.000.000	APBD		26,49%	
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	imbangan Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Desa	2 Kegiatan	171.000.000	APBD		2 Kegiatan	
							Kaji Terap Implementasi Perbup Cadangan Pangan	1 paket			1 paket		
							Monitoring Penyaluran Cadangan Pangan	12 bulan			12 bulan		
							Sosialisasi Cadangan Pangan Desa	120 Desa			120 Desa		
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Pemantauan stok gabah di penggilingan dan pedagang	47 kecamatan	155.000.000	APBD		47 kecamatan	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Cadangan Pangan yang tersedia	70 ton	910.000.000	APBD		70 ton	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan	1 unit	204.000.000	APBD		1 unit	
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			4,32%	235.000.000	APBD		4,32%	



2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Draft Perbup Penentuan Harga Minimum Lokal	1 dokumen	235.000.000	APBD		1 dokumen	
							Rapat Koordinasi Lintas Perangkat Daerah untuk penentuan harga minimum lokal	6 Kegiatan				6 Kegiatan	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			26,63%	1.448.082.900	APBD		26,63%	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Jumlah edukasi dalam pencapain Target Konsumsi	5 kegiatan	300.000.000	APBD		5 kegiatan	
							Jumlah laporan ketersediaan dan keragaman produk pangan Lokal	1 dokumen				1 dokumen	
							Jumlah laporan target Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen				1 dokumen	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Agrofood Festival Tk.Kab.Sukabumi	1 event	864.365.000	APBD		1 event	
							Bimbingan teknik budidaya tanaman	14 Kegiatan				14 Kegiatan	
							bimbingan teknis diversifikasi pangan lokal	12 Kegiatan				12 Kegiatan	
							bimbingan teknis penyusunan menu B2SA Non Beras Non Terigu	1 Kegiatan				1 Kegiatan	



					Bimtek pemasaran hasil P2L	14 Kegiatan			14 Kegiatan	
					Bimtek pengemasan hasil P2L	14 Kegiatan			14 Kegiatan	
					Buku menu B2SA	50 Buku			50 Buku	
					Diseminasi P2KP tingkat rumah tangga	10 Lokasi			10 Lokasi	
					Fasilitas sarana dan prasarana Pemasaran (intergrasi dekranasda)	1 paket			1 paket	
					Gerakan konsumsi pangan non beras non terigu	5 Lokasi			5 Lokasi	
					Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten	1 event			1 event	
					Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi	1 event			1 event	
					Lomba Mewarnai Gambar Sayur & Buah	1 event			1 event	
					P2KP pada usia sekolah	10 Kegiatan			10 Kegiatan	
					Pelatihan Olahan Pangan Lokal (Integrasi Dekranasda)	50 peserta			50 peserta	



							Peningkatan Kecakapan Hidup/Life Skill (Proyek Prioritas)	50 peserta				50 peserta	
							Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Kegiatan				5 Kegiatan	
							Promosi P2KP melalui media elektronik & media visual	12 Bulan				12 Bulan	
							Promosi pangan lokal melalui event regional & nasional	6 Event				6 Event	
							rapat koordinasi kegiatan upaya percepatan penganeekaragaman melalui pekarangan pangan lestari	2 Kegiatan				2 Kegiatan	
							Sosialisasi kegiatan P2L bagi pendamping/petugas	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
							Technical Meeting LCM Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Gerakan konsumsi pangan non beras non terigu	5 lokasi	283.717.900	APBD		5 lokasi	
						Jumlah laporan hasil penghitungan skor kabupaten	1 dokumen						1 dokumen



						Jumlah laporan target Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan Gizi	1 dokumen				1 dokumen		
						Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung program P2WKSS, PKK dan program lintas sektor lainnya	10 Paket				10 Paket		
						Rapat Koordinasi Lintas Perangkat Daerah	3 kegiatan				3 kegiatan		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	845.311.250	APBD		Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan		
2	09	04	01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		35,03%	296.311.250	APBD		35,03%		
2	09	04	01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	FGD Tim Penyusunan FSVA	1 kegiatan	296.311.250	APBD		1 kegiatan	
							FGD Tim Penyusunan SKPG	1 kegiatan				1 kegiatan	
							Jumlah Peserta Diseminasi Hasil Penyusunan FSVA	50 orang				50 orang	
							Jumlah Peserta Diseminasi Hasil Penyusunan SKPG	50 orang				50 orang	



							Kajian Penyusunan analisis FSVA dengan pihak ketiga (Jasa Konsultan)	1 dokumen				1 dokumen	
							Kajian Penyusunan analisis SKPG dengan pihak ketiga (Jasa Konsultan)	1 dokumen				1 dokumen	
							Monitoring dan Evaluasi FSVA	386 Desa				386 Desa	
							Monitoring dan Evaluasi SKPG	47 Kecamatan				47 Kecamatan	
2	09	04	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			64,94%	549.000.000	APBD		64,94%	
2	09	04	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Jumlah peserta diseminisasi	55 orang	299.000.000	APBD		55 orang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kabupaten			1 Kegiatan				1 Kegiatan		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kabupaten			386 Desa				386 Desa		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Kecamatan			47 Kecamatan				47 Kecamatan		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Propinsi			1 Kegiatan				1 Kegiatan		



						Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral Tk. Pusat	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
						Monitoring dan Evaluasi Penanganan Derah Rawan Pangan	386 Desa				386 Desa	
2	09	04	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Bimbingan Teknis Pembinaan Desa Mandiri Pangan	50 orang	250.000.000	APBD	50 orang	
						Bimbingan Teknis Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan	50 orang	50 orang				
						Bimbingan Teknis Pengelolaan Warung Pangan	1 kegiatan	1 kegiatan				
						Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat /kelompok tani	5 paket	5 paket				
						umlah warung pangan	2 lokasi	2 lokasi				
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2.609.610.000	APBD	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		54%	2.609.610.000	APBD		54%	



2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Direktori OKKPD Tingkat Kabupaten Sukabum	10 buku	380.000.000	APBD	10 buku	
							Draft perundang-undangan penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu PSAT	1 Dokumen'			1 Dokumen'	
							Jumlah peserta bimtek keamanan dan mutu pangan di lokasi CPUGG	3 kegiatan			3 kegiatan	
							Jumlah peserta bimtek petugas surveillance PSAT	1 kegiatan			1 kegiatan	
							Jumlah Peserta Diseminasi Pengawasan Keamanan & Mutu Pangan pada Ritel & Rumah Kemas	50 peserta			50 peserta	
							Jumlah peserta rapat koordinasi pengendalian PSAT	2 kegiatan			2 kegiatan	
							Kader Pangan Aman	47 Kecamatan			47 Kecamatan	
							Kampanye Keamanan Pangan	47 Kecamatan			47 Kecamatan	



							Leaflet Keamanan & Mutu Pangan	5 jenis				5 jenis	
							Media Informasi Keamanan dan Mutu PSAT	1 paket				1 paket	
							Pelatihan Pengambil Contoh Keamanan & Mutu PSAT	5 orang				5 orang	
							Pembinaan dan Pengawasan Keamanan & Mutu Pangan	24 kali				24 kali	
							World Safety Day Tingkat Kabupaten	1 event				1 event	
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Pencetakan Hologram Produk Prima	125 lembar	340.000.000	APBD		125 lembar	
						Sertifikat keamanan PSAT	25 produk					25 produk	
						Sertifikat Prima	25 produk					25 produk	
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Sampel pengajuan pengujian PSAT-PDUK	25 produk	351.000.000	APBD		25 produk	
						Identifikasi lokasi pengajuan Pendaftaran Produk Prima	25 Lokasi					25 Lokasi	
						Identifikasi lokasi pengajuan Pendaftaran PSAT-	25 Lokasi					25 Lokasi	



						PDUK							
						Identifikasi produk pengajuan Pendaftaran Produk Prima	25 Lokasi				25 Lokasi		
						Identifikasi produk pengajuan Pendaftaran PSAT-PDUK	25 Lokasi				25 Lokasi		
						Pencetakan Hologram Produk Prima	125 lembar				125 lembar		
						sampel pengajuan pengujian Produk Prima	25 produk				25 produk		
						Sertifikat Prima	25 produk				25 produk		
						Surveillance registrasi Produk Prima	50 Kali				50 Kali		
						Surveillance registrasi PSAT-PDUK	50 Kali				50 Kali		
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Jumlah inspeksi pangan segar asal tumbuhan	1 komoditas	570.000.000	APBD		1 komoditas	
						Rekomendasi sertifikasi Produk Prima	25 produk					25 produk	
						Rekomendasi sertifikasi PSAT	25 petani					25 petani	



2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan. Semua Desa / Kelurahan	Alat Pendukung pengujian keamanan dan mutu pangan	20 jenis	968.610.000	APBD		20 jenis	
							Aplikasi SiKASEP (Sistem Informasi Keamanan dan Kesehatan Pangan)	1 aplikasi				1 aplikasi	
							Bahan Uji Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan	3 paket				3 paket	
							Jumlah inspeksi pangan segar asal tumbuhan	1 komoditas				1 komoditas	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

4.1 Visi Dan Misi Kabupaten Sukabumi

Memasuki periode pembangunan jangka menengah Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukabumi yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut:

TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATHIN”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.



Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.

Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan menyumbang kontribusi dalam pencapaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam misi 2 (dua) yaitu **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut.



1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian;
2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan;
3. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta melindungi hak-hak pekerja
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi local;
7. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
8. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
9. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
10. Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Kepada Masyarakat;
11. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing;
12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.

Berdasarkan tujuan pembangunan diatas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah tujuan pertama yaitu **“Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian”**.



Untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis
2. Meningkatnya produksi pangan
3. Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan serta teratasinya kerawanan pangan
4. Terwujudnya sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi local
6. Meningkatnya produksi pertanian non pangan

Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2016-2021 yang berkaitan dengan Tupoksi dari Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 Bagi Dinas Ketahanan Pangan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata	Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Tangguh berbasis Sumber Daya Pangan, kelembagaan pangan dan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan2. Peningkatan cadangan pangan3. Persentase Tingkat Konsumsi Beras4. Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan5. Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan



Berkelanjutan	berkelanjutan.	Kearifan Lokal	
---------------	----------------	----------------	--

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) enam tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 terdapat enam prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha;
4. Peningkatkan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda Dan Olahraga;
6. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat.

Berdasarkan prioritas diatas yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan yaitu **Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis** dengan penjabaran sebagai berikut : Dalam kehidupan manusia terdapat tiga utama kebutuhan pokok yaitu sandang,



pangan, dan papan. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan untuk dapat beraktifitas. Kabupaten Sukabumi merupakan daratan dengan aneka sumber daya yang berpotensi tinggi, lahan - lahan potensial dalam bidang pertanian sebagai bahan pokok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyikapi isu/permasalahan di masa depan tentang kurangnya ketersediaan bahan pokok pangan, Kabupaten Sukabumi harus mulai mewaspadaai dan menyiasati ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang krusial karena hal ini akan memberi dampak pada sektor-sektor yang sedang berjalan.

Ketahanan pangan menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan adanya hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Peran aktif pemerintah dan masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara sinergi. Sehingga dengan memiliki ketahanan pangan, daerah akan memiliki ketersediaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kabupaten Sukabumi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya di Tahap Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya



permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Kelautan

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	Bidang Pertanian dan Kelautan.	<ul style="list-style-type: none">• Perekonomian lokal diarahkan untuk menciptakan agro-industri• SDM berkualitas, diarahkan untuk mewujudkan standar kompetensi aparatur (tenaga penyuluh) serta kelompok/gapoktan• Infrastruktur pertanian, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana kelembagaan pasar komoditas pertanian di tingkat petani (<i>Farm-Gate Market</i>) maupun nelayan• Ketahanan Pangan dan Energi, diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi sebagai dampak dari ketahanan pangan (<i>food security</i>) dan kedaulatan pangan (<i>food sovereignty</i>); Meningkatkan aksesibilitas petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif, termasuk permodalan dan infrastruktur pertanian• Regulasi PEL, diarahkan untuk Mewujudkan komitmen bersama	<ul style="list-style-type: none">• Fokus pembangunan ekonomi lokal belum berbasis agro industri• SDM Aparatur (tenaga penyuluh) belum memenuhi standar kompetensi• Belum optimalnya kualitas kompetensi Kelompok Tani/Gapoktan• Belum adanya pasar komoditas untuk petani dan nelayan• Masih banyak terdapat daerah rawan pangan• Belum sepenuhnya pelaksanaan Perda LP2B	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan ekonomi lokal berbasis lokal• Bimtek dan Diklat bagi Aparatur (tenaga penyuluh)• Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan• Pendirian sentra komoditas• Penanganan desa rentan pangan dan penyediaan bahan pangan masyarakat• Penegakan Perda LP2B



No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
		<p>dalam mengembangkan agribisnis untuk seluruh stakeholder; Mewujudkan peraturan daerah tentang lahan abadi pertanian;</p> <ul style="list-style-type: none">• Indikator Makro Agribisnis, yang ditujukan untuk mewujudkan kendali peningkatan indikator makro pembangunan agribisnis 20 %	<ul style="list-style-type: none">• Belum terwujudnya indikator makro agribisnis	<ul style="list-style-type: none">• Nilai Tukar Petani (NTP) dan Kontribusi pertanian terhadap PDRB

Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk SKPD yang terlibat di dalamnya.



Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

No	Misi	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis	Mendorong produktivitas wilayah melalui pengembangan sentra produksi	Pembangunan infrastruktur menuju sentra produksi dan pariwisata	Pembangunan sarana pemerintahan, penataan pusat pertumbuhan Palabuhanratu dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing	Pembangunan Ekonomi berbasis kawasan	Pemeliharaan infrastruktur wilayah

1.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah menetapkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, merupakan program dan anggaran yang masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasionalkan setiap tahunnya, maka perlu dijabarkan kedalam RKPd sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah dokumen RKPd



dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), perumusan PPAS dan terakhir perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi tahunan untuk selama 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 untuk diarahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kabupaten Sukabumi. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 berisi program dan kegiatan yang prioritas, baik untuk mencapai secara langsung tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan yang telah disusun kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD



Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Sukabumi (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020. Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rincian Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2020, adalah terlampir.



BAB V PENUTUP

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kerja ini adalah upaya untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi tersebut.

Disadari bahwa penyampaian Rencana Kerja ini masih terlalu umum, mengingat penyajian data dan beberapa indikator masih belum dapat dipertajam sesuai dengan harapan tetapi paling tidak akan dapat memberikan gambaran awal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Mengingat Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, maka dirasakan perlu pembinaan dan masukan dari instansi yang berkompeten untuk penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja berikutnya.

Sukabumi, September 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sukabumi



Dana Budiman, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610511 198603 1 008